

## ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH UNTUK BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA TOMOHON

### ANALYSIS OF LOCAL REVENUE TO DISTRICT EXPENDITURE ON TOMOHON CITY GOVERNMENT

Oleh:

**Aprisilia Ristia Kaeng<sup>1</sup>**  
**David P.E. Saerang<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi  
Universitas Sam Ratulangi Manado

Email : <sup>1</sup>[aprisiliakaeng@rocketmail.com](mailto:aprisiliakaeng@rocketmail.com)

<sup>2</sup>[d.saerang@lycos.com](mailto:d.saerang@lycos.com)

**Abstrak:** Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kota Tomohon diantaranya masih lemahnya kemampuan Pendapatan Asli Daerah, sehingga akan berpengaruh langsung terhadap Pendapatan Daerah yang merupakan sumber keuangan untuk membiayai Belanja Operasional. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui berapa besar penggunaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada total pendapatan untuk memenuhi Belanja Daerah Pemerintah Kota Tomohon juga mengetahui tingkat kemandirian PAD dibandingkan dengan dana bantuan dari pusat. Metode analisis yang digunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan kinerja pendapatan pemerintah Kota Tomohon dilihat dari analisis rasio keuangan dalam hal ini, derajat desentralisasi fiskal dan kemandirian keuangan daerah masih sangat rendah. Pemerintah Kota Tomohon belum mampu mengelola dan mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya, sehingga masih sangat bergantung pada bantuan pemerintah berupa dana transfer/dana perimbangan dari pemerintah pusat. Sebaiknya pemerintah Kota Tomohon berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya dengan cara menggali, mengembangkan dan mengolah potensi maupun sumber daya yang tersedia agar kota Tomohon menjadi kota mandiri tanpa ketergantungan yang besar terhadap bantuan dana dari pemerintah pusat maupun provinsi.

**Kata kunci:** pendapatan asli daerah, belanja daerah

**Abstract:** The current problem that is faced by the local government of Tomohon, one out of many, is about the low local income, in turn will directly influence the ability to finance the local government operational expenditure. The objective of this research to find out how significant the contribution of local income toward governmental expenditure. In addition, this research is to reveal what is the degree of dependence in term of local government revenues toward the central government funds. The analysis method is using descriptive method. The result showed, by looking at the financial ratio analysis, the degree of fiscal decentralization and financial independency are very low. The local government of Tomohon is still unable to manage and maximize its local income, since Tomohon is still very dependent on central government assistance in the form of fund transfer/equalization fund. It is adviced that the local government of Tomohon ought to boost its local income by diversifying the taxable objects and resources so that Tomohon will be an independent city that is able to finance its own expenditure.

**Keywords:** local revenue, district expenditure

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Reformasi sektor publik yang disertai adanya tuntutan demokratisasi menjadi suatu fenomena global termasuk di Indonesia. Tuntutan demokratisasi ini menyebabkan aspek transparansi dan akuntabilitas. Kedua aspek tersebut menjadi hal penting dalam pengelolaan pemerintah termasuk di bidang pengelolaan keuangan negara maupun daerah. Pengamat ekonomi, pengamat politik, investor, hingga rakyat mulai memperhatikan setiap kebijakan dalam pengelolaan keuangan.

Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban APBD. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak/retribusi dan mengelola sumber daya alam. Sumber dana bagi daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan (DBH, DAU, dan DAK) dan Pendapatan lain-lain yang sah. Tiga sumber tersebut langsung dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui APBD, melalui kerjasama dengan Pemerintah Pusat (Halim, 2007:252).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana kegiatan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan batas maksimal untuk periode anggaran (Halim, 2007:252). APBD juga diartikan sebagai rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PP No.24 Tahun 2005). Sedangkan menurut PP Nomor 58 Tahun 2005, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yaitu daerah diberikan otonomi atau kewenangan kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Adanya desentralisasi keuangan merupakan konsekuensi dari adanya kewenangan untuk mengelola keuangan secara mandiri. Dalam melaksanakan otonomi daerah berdasarkan asas desentralisasi, yang merupakan sumber utama bagi daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah dalam suatu daerah meliputi, Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil bumi dan pengelolaan kekayaan lainnya serta Pendapatan lainnya.

### Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Berapa besar penggunaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada total pendapatan untuk memenuhi Belanja Daerah Pemerintah Kota Tomohon
2. Tingkat kemandirian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan dana bantuan dari pusat.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik diartikan sebagai mekanisme akuntansi swasta yang diberlakukan dalam praktik-praktik organisasi publik (Suyudi 2007:13). Akuntansi sektor publik juga didefinisikan sebagai mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang diterapkan pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta (Bastian 2006:118). Dari definisi diatas ditarik kesimpulan tentang pengertian akuntansi adalah suatu disiplin ilmu yang menyediakan informasi yang diperlukan perusahaan dalam melaksanakan kegiatannya secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang akan menjadi dasar manajemen dalam pengambilan keputusan.

### Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 1 menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, menyebutkan struktur APBD merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari:

1. Pendapatan Daerah
2. Belanja Daerah
3. Pembiayaan Daerah

### **Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah adalah hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana. Pendapatan daerah dibagi menjadi 3 bagian, Pendapatan asli daerah, Dana perimbangan dan Lain-lain pendapatan.

#### **1. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah hendaknya didukung upaya Pemerintah Daerah dengan meningkatkan kualitas layanan publik (Mardiasmo, 2009:46).

##### **a) Pajak Daerah**

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dihunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah (Yani, 2008:52).

##### **b) Retribusi Daerah**

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Yani, 2008:63).

#### **2. Dana Perimbangan**

#### **3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah**

### **Belanja Daerah**

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran uang dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh daerah.

### **Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah adalah transaksi keuangan pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus APBD.

### **Penelitian Terdahulu**

Marizka (2010) dengan judul Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada pemerintah Kota Medan. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kinerja pendapatan pemerintah kota Medan sudah cukup baik. Nurhayati (2008) dengan judul Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Bitung. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah kota Bitung memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola dana masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pembangunan daerah.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivism*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian (Sugiyono, 2011:13).

### Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah (PPKBMD) Kota Tomohon. Waktu penelitian yang dilakukan selama 2 bulan April – Mei..

### Prosedur Penelitian

Adapun prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengajukan permohonan penelitian
2. Disposisi pimpinan
3. Pengumpulan data
4. Analisa data penelitian
5. Analisa penerapan
6. Kesimpulan dan saran

### Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif, sumber data primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

### Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Menurut (Sugiyono 2007:13) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih independen tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel lain.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Wilayah

Letak wilayah Kota Tomohon dari sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pineleng dan Tombulu (Kabupaten Minahasa), sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sonder dan Remboken (Kabupaten Minahasa) dan Kecamatan Tombariri (Kabupaten Minahasa), sebelah barat dengan Kecamatan Tombariri dan sebelah timur dengan Kecamatan Airmadidi (Kabupaten Minahasa Utara). Kota Tomohon dapat dicapai dengan menggunakan transportasi darat, jarak dari ibukota Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado  $\pm$  25 km. Dari Bandara Internasional Sam Ratulangi  $\pm$  34 km, dan dari Pelabuhan Internasional Bitung  $\pm$  60 km melalui Kabupaten Minahasa Utara dan Minahasa Induk. Jarak dari Kabupaten Minahasa Induk  $\pm$  15 km dan Kabupaten Minahasa Selatan  $\pm$  58 km.

### Hasil Penelitian

#### Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Untuk menganalisis realisasi dari APBD Kota Tomohon maka metode yang digunakan adalah analisis Varians (Selisih). Analisis varians ini digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah Kota Tomohon khususnya kinerja pelaksanaan anggaran yaitu dengan mengukur tingkat selisih baik menguntungkan ataupun yang tidak menguntungkan antara realisasi dengan anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

$$\text{Selisih Penerimaan/ Pengeluaran} = \text{Realisasi Anggaran} - \text{Anggaran}$$

**Tabel 1. Varians Pendapatan pada Pemerintah Kota Tomohon**

Tahun	Realisasi Pendapatan	Anggaran Pendapatan	Varians/Selisih
2010	Rp 367,166,458,000	Rp 293,670,614,000	Rp 73,495,844,000
2011	Rp 372,147,519,000	Rp 357,139,273,000	Rp 15,008,246,000
2012	Rp 388,660,650,802	Rp 374,947,856,737	Rp 13,712,794,065

Sumber : Data diolah (2015)

Tabel 1. menunjukkan bahwa pendapatan kota Tomohon terus mengalami kenaikan dalam tiga tahun anggaran yang diteliti dan pemerintah kota Tomohon selalu mampu merealisasikan pendapatan melampaui anggaran belanja ditetapkan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa realisasi pendapatan kota tomohon sudah baik karena menunjukkan bahwa realisasinya selalu lebih besar dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan untuk tiga tahun anggaran yang diteliti.

### Analisis Kinerja Pendapatan

Untuk menganalisis kinerja pendapatan dari pemerintah kota Tomohon, maka metode analisis yang digunakan adalah :

#### 1. Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Analisis pertumbuhan pendapatan dilakukan untuk mengetahui perkembangan kinerja keuangan serta kecenderungan baik berupa kenaikan atau penurunan kinerja. Cara perhitungannya sebagai berikut :

$$\text{Pertumbuhan PAD tahun } X_t = \frac{\text{PAD tahun } X_t - \text{PAD tahun } X_{t-1}}{\text{PAD tahun } X_{t-1}}$$

**Tabel 2. Pertumbuhan Pendapatan pada Pemerintah Kota Tomohon**

Tahun	PAD	Pertumbuhan (%)	Total Pendapatan	Pertumbuhan (%)
2009	Rp 6,342,459,000	-	Rp 317,287,659,000	-
2010	Rp 5,713,312,000	-39,9%	Rp 367,166,458,000	15,7%
2011	Rp 8,095,030,000	41,6%	Rp 372,147,519,000	13,5%
2012	Rp 11,260,700,311	39,1%	Rp 388,660,650,802	44,3%

Sumber : Data Diolah (2015)

Tabel 2. Menunjukkan baik PAD dan total pendapatan terus mengalami peningkatan pertumbuhan yang positif, PAD dengan persentase 31,5% tahun 2010, 41,6% tahun 2011 dan 39,1% pada tahun 2012. Sedangkan total pendapatan mengalami peningkatan 15,7% pada tahun 2010, 13,5% pada tahun 2011 dan 44,3% pada tahun 2012.

#### 2. Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan merupakan teknik analisis yang dilakukan dengan membandingkan suatu perkiraan dengan perkiraan lainnya dalam laporan keuangan yang sama.

##### a) Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah PAD dengan total pendapatan daerah. Merupakan cara yang digunakan untuk menilai kemampuan keuangan daerah artinya dengan menghitung derajat desentralisasi maka dapat diketahui atau diukur seberapa besar kemampuan keuangan daerah pemerintah kota Tomohon ini dalam mengolah PAD.

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

**Tabel 3. Derajat Desentralisasi pada Pemerintah Kota Tomohon**

Tahun	PAD	Pendapatan Daerah	Rasio Derajat Desentralisasi (%)
2010	Rp 5,713,312,000	Rp 367,166,458,000	1,55 %
2011	Rp 8,095,030,000	Rp 372,147,519,000	2,17 %
2012	Rp 11,260,700,331	Rp 388,660,650,802	2,89 %
<b>Rata - rata</b>			2,20 %

Sumber : Data Diolah (2015)

Tabel 3. menunjukkan bahwa derajat desentralisasi kota Tomohon cukup rendah atau sangat kurang. Karena meskipun terdapat peningkatan setiap tahunnya namun dari persentase yang hanya berkisar 1,55% , 2,17% dan 2,89% masih sangat minim. Dengan perhitungan ini bias dilihat dan diketahui bahwa kemampuan pemerintah kota Tomohon masih perlu ditingkatkan karena belum mampu menggali dan mengelola pendapatan asli daerahnya menilai dari jumlah PAD nya yang jumlahnya masih sangat kecil dibandingkan dengan total pendapatannya. Pemerintah kota Tomohon ini masih sangat bergantung pada dana perimbangan dari pusat maupun bantuan dari provinsi sehingga kemampuan keuangan daerahnya masih sangat kurang.

b) Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan PAD dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi untuk menilai sejauh mana tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah.

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Prov. Dan Pinjaman}} \times 100\%$$

**Tabel 4. Kemandirian Keuangan pada Pemerintah Kota Tomohon**

Tahun	PAD	Bantuan Pemerintah Pusat/Prov. & Pinjaman	RasioKemandirian
2010	Rp 5,713,312,000	Rp 296,987,706,000	1,92%
2011	Rp 8,095,030,000	Rp 306,064,943,000	2,64%
2012	Rp 11,260,700,331	Rp 376,176,502,700	2,99%
<b>Rata - rata</b>			2,51%

Sumber : Data Diolah (2015)

Tabel 4. menunjukkan bahwa kemandirian keuangan kota Tomohon sangat rendah, hanya berkisar antara 1,92% , 2,64% dan 2,99% untuk tiga tahun anggaran berturut-turut yaitu pada tahun anggaran 2010, 2011 dan 2012, sekalipun ada kecenderungan peningkatan setiap tahunnya. Pemerintah kota Tomohon harus berusaha mengurangi ketergantungan mereka terhadap sumber dana ekstern atau sumber dana yang berasal dari luar daerah dan mengoptimalkan untuk meningkatkan PAD.

**Analisis Kinerja Belanja**

Analisis pertumbuhan belanja dilakukan untuk mengetahui perkembangan kinerja keuangan serta kecenderungan baik berupa kenaikan atau penurunan kinerja dari pemerintah.

$$\text{Pertumbuhan Belanja tahun } X_t = \frac{\text{Belanja Tahun } X_t - \text{Belanja tahun } X_{t-1}}{\text{Belanja tahun } X_{t-1}} \times 100\%$$

**Tabel 5. Pertumbuhan Belanja pada Pemerintah Kota Tomohon**

Tahun	Belanja Daerah	Tingkat Pertumbuhan
2009	Rp 300,128,826,000	-
2010	Rp 293,670,614,000	-2,15%
2011	Rp 357,139,273,000	2,16%
2012	Rp 374,947,856,737	4,98%
<b>R a t a - r a t a</b>		1,66%

Sumber : Data Diolah (2015)

Tabel 5. Menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan mengalami peningkatan yang positif untuk tahun anggaran 2011 dan 2012. Sementara untuk tahun anggaran 2010 mengalami penurunan pertumbuhan yaitu sebesar 2,15% dengan rata-rata pertumbuhan belanja yaitu 1,66%.

## Pembahasan

### Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Hasil analisis ini menunjukkan pendapatan kota Tomohon terus mengalami kenaikan dalam tiga tahun anggaran yang diteliti dan pemerintah kota Tomohon selalu mampu merealisasikan pendapatan melampaui anggaran belanja ditetapkan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa realisasi pendapatan kota Tomohon sudah baik karena menunjukkan bahwa realisasinya selalu lebih besar dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan untuk tiga tahun anggaran yang diteliti.

### Analisis Kinerja Pendapatan

1. Analisis pertumbuhan pendapatan  
Hasil analisis ini menunjukkan, baik PAD dan total pendapatan terus mengalami peningkatan pertumbuhan yang positif, PAD dengan persentase 31,5% tahun 2010, 41,6% tahun 2011 dan 39,1% pada tahun 2012. Sedangkan total pendapatan mengalami peningkatan 15,7% pada tahun 2010, 13,5% pada tahun 2011 dan 44,3% pada tahun 2012.
2. Analisis Rasio Keuangan
  - a) Derajat Desentralisasi  
Hasil analisis ini menunjukkan derajat desentralisasi kota Tomohon cukup rendah atau sangat kurang. Karena meskipun terdapat peningkatan setiap tahunnya namun dari persentase yang hanya berkisar 1,55% , 2,17% dan 2,89% masih sangat minim. Dengan perhitungan ini bias dilihat dan diketahui bahwa kemampuan pemerintah kota Tomohon masih perlu ditingkatkan karena belum mampu menggali dan mengelola pendapatan asli daerahnya menilai dari jumlah PAD nya yang jumlahnya masih sangat kecil dibandingkan dengan total pendapatannya. Pemerintah kota Tomohon ini masih sangat bergantung pada dana perimbangan dari pusat/provinsi sehingga kemampuan keuangannya masih sangat kurang.
  - b) Kemandirian Keuangan Daerah  
Hasil analisis ini menunjukkan kemandirian keuangan kota Tomohon sangat rendah, hanya berkisar antara 1,92% , 2,64% dan 2,99% untuk tiga tahun anggaran berturut-turut yaitu pada tahun anggaran 2010, 2011 dan 2012, sekalipun ada kecenderungan peningkatan setiap tahunnya. Pemerintah kota Tomohon harus berusaha mengurangi ketergantungan mereka terhadap sumber dana ekstern atau sumber dana yang berasal dari luar daerah dan mengoptimalkan untuk meningkatkan PAD.

### Analisis Kinerja Belanja

Hasil analisis ini menunjukkan tingkat pertumbuhan mengalami peningkatan yang positif untuk tahun anggaran 2011 dan 2012. Sementara untuk tahun anggaran 2010 mengalami penurunan pertumbuhan yaitu sebesar 2,15% dengan rata-rata pertumbuhan belanja yaitu 1,66%. Hasil analisis keseluruhan menunjukkan kinerja Pendapatan Pemerintah Kota Tomohon dilihat dari analisis rasio keuangan dalam hal ini derajat desentralisasi fiskal dan kemandirian keuangan daerah masih sangat rendah. Pemerintah Kota Tomohon belum mampu mengelola dan mengoptimalkan PAD, sehingga masih sangat bergantung pada bantuan pemerintah berupa dana transfer/dana perimbangan dari pemerintah pusat. Analisis ini mendapatkan hasil yang sama seperti penelitian Marizka (2010) sebelumnya yaitu masih rendahnya kemampuan pemerintah dalam mengoptimalkan PAD dan pemerintah masih sangat bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tomohon, sudah terealisasi dengan baik, melihat dari jumlah pendapatan yang selalu melebihi anggaran yang ditargetkan, dan total realisasi belanja selalu lebih rendah dari pada total anggaran belanja yang ditargetkan.
2. Kinerja Pendapatan Pemerintah Kota Tomohon dilihat dari analisis pertumbuhan pendapatan, untuk tahun anggaran 2010-2012 sudah cukup baik karena terlihat terus mengalami peningkatan pertumbuhan PAD.
3. Kinerja Pendapatan Pemerintah Kota Tomohon dilihat dari analisis rasio keuangan dalam hal ini derajat desentralisasi fiskal dan kemandirian keuangan daerah masih sangat rendah. Pemerintah Kota Tomohon belum mampu mengelola dan mengoptimalkan PAD, sehingga masih sangat bergantung pada bantuan pemerintah berupa dana transfer/dana perimbangan dari pemerintah pusat.
4. Kinerja Belanja Pemerintah Kota Tomohon dilihat dari pertumbuhan belanjanya, mengalami kenaikan pada setiap tahun anggaran yang diteliti.
5. Kinerja Pemerintah Kota Tomohon dilihat dari pembiayaan sudah baik karena melihat data yang diperoleh bahwa SILPA bersaldo positif.

### Saran

Saran dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Pemerintah Kota Tomohon, perlu lebih berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya (PAD), dengan cara menggali, mengembangkan dan mengolah potensi-potensi maupun sumber daya yang tersedia.
2. Meningkatkan terus kinerja pengelolaan terhadap realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, agar kota Tomohon mampu menjadi kota yang mandiri tanpa ketergantungan yang besar terhadap bantuan dana dari pemerintah pusat maupun provinsi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi ketiga, Penerbit Salemba 4, Jakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi keempat, Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Marizka. 2010. Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan. [http://www.researchgate.net/publication/42351043 Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan](http://www.researchgate.net/publication/42351043_Analisis_Kinerja_Pengelolaan_Anggaran_Pendapatan_Dan_Belanja_Daerah_Pemerintah_Kota_Medan). Diakses pada 18 April 2015. Hal. 1.
- Nurhayati. 2008. Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Bitung. *Jurnal EMBA* Vol. 2 No. 4 2014. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/6263>. Diakses pada 19 April 2015. Hal. 1.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Penerbit Alfabet, Bandung.
- Suyudi, Arief. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi kedua, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Direksi Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Jakarta.
- Yani, Ahmad. 2008. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Edisi revisi, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.